MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa Nomor 16 A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85111, www.ptun-kupang.go.id, info@ptun-kupang.go.id

Nomor : -/WKPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Tindak Lanjut Monev Peta Bisnis Proses

Yth. Anggota Tim Review Peta Bisnis
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tindak Lanjut Monev Peta Bisnis Proses yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 19 Oktober 2026
Waktu : 16:00 WITA
Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang
Acara : Rapat Tindak Lanjut Monev Peta Bisnis Proses

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 19 Oktober 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua Tim

Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 197008242005022002

Notulen : Debora S. Anduwacu, S.H.
Dokumentasi : Martha Sinai Manuhutu, S.H.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa Nomor 16 A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur 85111, www.ptun-kupang.go.id, info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Undangan Tindak Lanjut Monev Peta Bisnis Proses Nomor -/WKPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026 tanggal 19 Oktober 2026
2. Monev Peta Bisnis Proses tanggal 19 Oktober 2026

Hari : Senin

Tanggal : 19 Oktober 2026

Pukul : 16.00 – 16.30 WITA

Tempat : Ruang Sidang Utama PTUN Kupang

Acara : Tindak Lanjut Monev Peta Bisnis Proses

Peserta : Tim Review Peta Bisnis

Jalannya Kegiatan :

Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Review Peta Bisnis kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Tim Review Peta Bisnis melakukan peninjauan dan evaluasi atas Peta Bisnis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan diperoleh hasil sebagai berikut:
   a. Nomenklatur Peta Proses Bisnis belum sesuai, sehingga perlu diubah yang sebelumnya "Peta Bisnis Proses" menjadi "Peta Proses Bisnis" agar sesuai dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 995/SEK/SK/VII/2022 tentang Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung tanggal 29 Juli 2022;

b. Peta Proses Bisnis disesuaikan dengan Mahkamah Agung dan ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang termasuk menyesuaikan nomenklatur menjadi Peta Bisnis Proses.

2. Hasil peninjauan dan evaluasi atas Peta Bisnis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar disampaikan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang beserta hasil Peta Proses Bisnis yang telah disesuaikan.

Kegiatan ditutup oleh Ketua Tim Review Peta Bisnis.

	Mengetahui, Ketua Tim
Notulis,	
Debora S. Anduwacu, S.H.	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR RAPAT TINDAK LANJUT MONEV PETA PROSES BISNIS

Hari, Tanggal : Senin, 19 Oktober 2026

NO	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	Siti Maisyarah	Ketua tim	1		
2	Putu Carina			2	
3	Donjo Bin		3		
4	Marsha S. Manuhutu			4	
5	Debora S. Anduwaeu		5		
6	Josep Klau			6	
7	Anthoneta Matatula		7		
8				8	
9.			9		

Foto Kegiatan 1

Dokumentasi



Foto Kegiatan 2

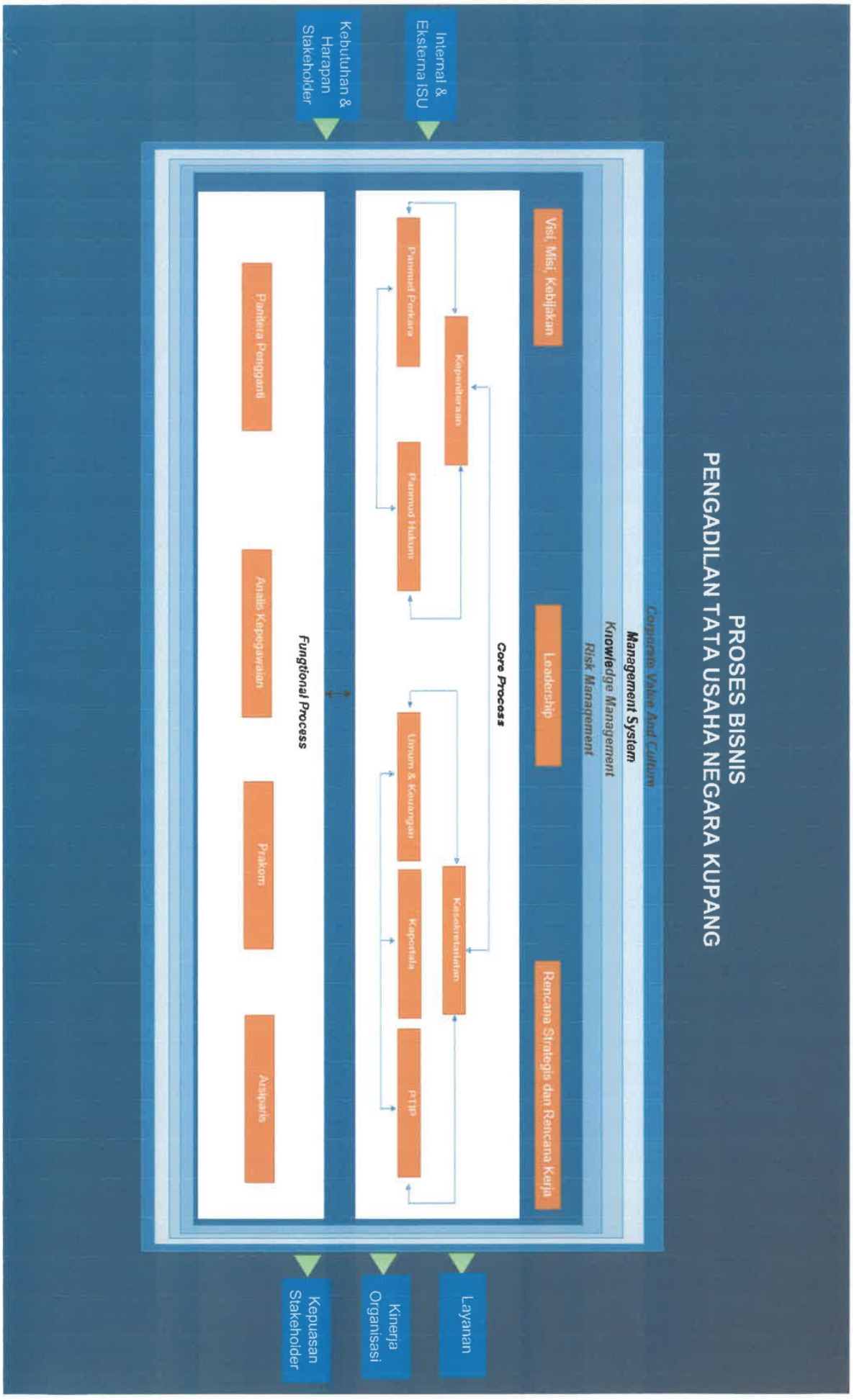

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI REVIEW PETA BISNIS PROSES PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kupang, 19 Oktober 2026

I. TEMUAN

Hasil Temuan Monev:

1. Bahwa perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi atas Peta Bisnis Proses.

II. TINDAK LANJUT

Tindak Lanjut Temuan Monev:

1. Tim Review Peta Bisnis melakukan peninjauan dan evaluasi atas Peta Bisnis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dan diperoleh hasil sebagai berikut:
   a. Nomenklatur Peta Proses Bisnis belum sesuai, sehingga perlu diubah yang sebelumnya "Peta Bisnis Proses" menjadi "Peta Proses Bisnis" agar sesuai dengan nomenklatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 995/SEK/SK/VII/2022 tentang Peta Proses Bisnis Mahkamah Agung tanggal 29 Juli 2022;
   b. Peta Proses Bisnis disesuaikan dengan Mahkamah Agung dan ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang termasuk menyesuaikan nomenklatur menjadi Peta Bisnis Proses;
2. Peta Proses Bisnis yang telah disesuaikan adalah sebagaimana terlampir;

Demikian Laporan Hasil tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas Peta Bisnis Proses. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Notulis,	Mengetahui, Ketua Tim
Debora S. Anduwacu, S.H.	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.

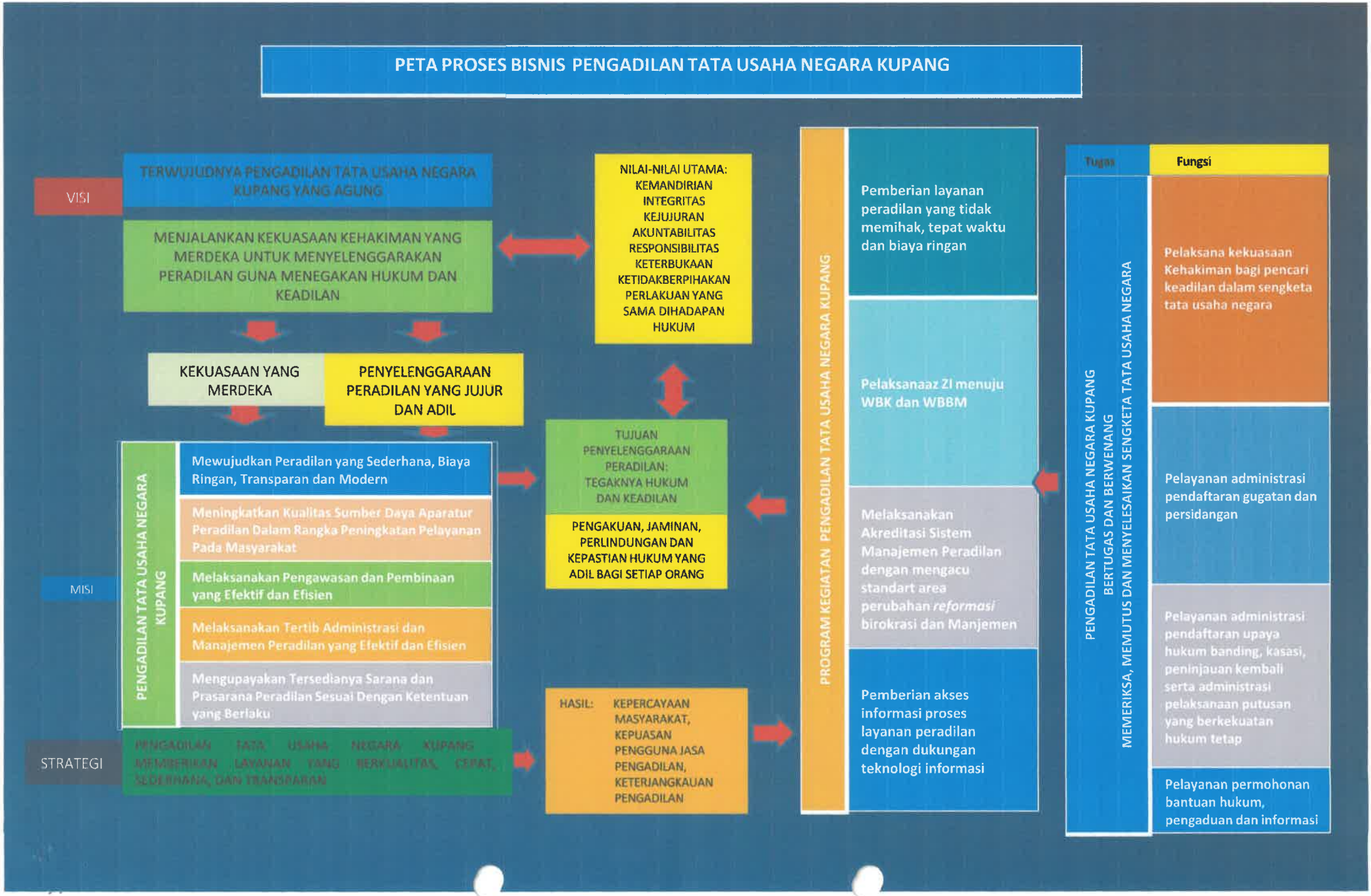
PETA PROSES BISNIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
VISI
TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG YANG AGUNG
MENJALANKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN
NILAI-NILAI UTAMA: KEMANDIRIAN INTEGRITAS KEJUJURAN AKUNTABILITAS RESPONSIBILITAS KETERBUKAAN KETIDAKBERPIHAKAN PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM
KEKUASAAN YANG MERDEKA
PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG JUJUR DAN ADIL
MISI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat
Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku
TUJUAN PENYELENGGARAAN PERADILAN: TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN
PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI SETIAP ORANG
STRATEGI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG MEMBERIKAN LAYANAN YANG BERKUALITAS, CEPAT, SEDERHANA, DAN TRANSPARAN
HASIL: KEPERCAYAAN MASYARAKAT, KEPUASAN PENGGUNA JASA PENGADILAN, KETERJANGKAUAN PENGADILAN
PROGRAM KEGIATAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Pemberian layanan peradilan yang tidak memihak, tepat waktu dan biaya ringan
Pelaksanaaz ZI menuju WBK dan WBBM
Melaksanakan Akreditasi Sistem Manajemen Peradilan dengan mengacu standart area perubahan reformasi birokrasi dan Manjemen
Pemberian akses informasi proses layanan peradilan dengan dukungan teknologi informasi
Tugas
Fungsi
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG BERTUGAS DAN BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi pencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara
Pelayanan administrasi pendaftaran gugatan dan persidangan
Pelayanan administrasi pendaftaran upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali serta administrasi pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap
Pelayanan permohonan bantuan hukum, pengaduan dan informasi